

# Struktur Politik dan Deradikalisasi Pendidikan Agama Bagi Anak Muda di Indonesia<sup>1</sup>

**Mohammad Iqbal Ahnaf**

*Centre for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)*

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

e-mail: *ahnafe7@yahoo.com*

---

DOI: 10.14421/jpi.2013.21.153-171

*Diterima: 12 Februari 2013*

*Direvisi: 26 Maret 2013*

*Disetujui: 17 Mei 2013*

---

## Abstract

*This paper addresses the issue of youth susceptibility to radicalization that has been a major concern since report finding suggesting high number of youth support and participation in radical group. Using political opportunity theory in social movement studies, this paper discusses the macro context of radicalization among youth. It shows that changes of social and political landscape in Indonesia has motivated the shift of focus of Islamist movement toward mobilization at the social level as an alternative to failing political activism in parliament. In addition to this macro context, this paper illustrates the forms of social milieu in schools that are critical to radicalization in schools. It concludes that the key to radicalization in school does not primarily lay in religious teaching curriculum, but on condition and activities outside classroom that allow transmission of radical narratives among students.*

**Keywords:** *youth, school, radicalization*

## Abstrak

Banyaknya anggota kelompok radikal yang berusia muda memunculkan pertanyaan tentang kerentanan pengaruh ideologi radikal di kalangan anak muda. Tulisan ini menjelaskan konteks makro berupa lanskap sosial-politik di Indonesia yang memungkinkan terjadinya transmisi ideologi radikal di kalangan anak muda. Menggunakan teori gerakan sosial, konteks makro ini diidentifikasi sebagai struktur peluang politik (*political opportunity structure*) yang memberi ruang bagi mobilisasi

---

<sup>1</sup> Sebagian dari isi tulisan ini diambil dari tulisan penulis sebelumnya. Lihat Mohammad Iqbal Ahnaf, *Contesting Morality: Youth Piety and Pluralism in Indonesia*, Pluralism Working Paper, No. 10, 2012.

pengaruh kelompok-kelompok radikal di tingkat masyarakat sebagai alternatif terhadap ‘kekalahannya’ politik Islam dalam politik kepartaian atau parlemen. Selain perubahan sosial-politik di tingkat makro, tulisan ini juga memberi ilustrasi situasi lingkungan anak muda di sekolah yang memungkinkan atau membatasi pengaruh ideologi radikal. Tulisan ini menunjukkan bahwa potensi radikalisme di lingkungan pendidikan tidak terletak utamanya pada kurikulum pendidikan agama, tetapi lingkungan sekolah yang memungkinkan interaksi siswa dengan narasi radikal di luar ruang kelas.

**Kata Kunci:** anak muda, sekolah, radikalisme

## Pendahuluan

Fakta terkait terorisme yang menunjukkan banyaknya remaja yang bergabung dengan kelompok teroris memicu perhatian yang besar terhadap ancaman radikalisme di kalangan anak muda.<sup>2</sup> Bagi sebagian pihak kaum muda, termasuk remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah, adalah salah satu segmen masyarakat yang paling rentan terpengaruh ideologi radikal dan terorisme. Keberhasilan kelompok-kelompok radikal dan teroris merekrut kaum muda tidak lepas dari lanskap sosial politik yang menjadi struktur peluang politik (*political opportunity structure*)<sup>3</sup> yang mendukung perluasan pengaruh kelompok radikal. Berbeda dengan kajian-kajian tentang radikalisme pada umumnya yang menekankan pada aspek ideologi sebagai daya tarik utama gerakan radikal,<sup>4</sup> tulisan ini menunjukkan faktor

---

<sup>2</sup> Fakta ini diantaranya merujuk pada tertangkapnya banyak anggota jaringan teroris yang pada umumnya berusia muda.

<sup>3</sup> Istilah struktur peluang politik yang populer dalam teori gerakan sosial merujuk pada perubahan konfigurasi peta kekuasaan, konteks sosial dan politik yang memberi preseden yang menguntungkan atau merugikan bagi perkembangan satu gerakan sosial tertentu. Salah satu definisi yang sering dikutip diberikan oleh Kitschelt: “specific configurations of resources, institutional arrangements and historical precedents for social mobilization, which facilitate the development of protest movements in some instances and constrain them in others.” Lihat Herbert Kitschelt, “Political Opportunity Structure and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies,” *British Journal of Political Science*, 16, hlm. 57-85.

<sup>4</sup> Kuatnya cara pandang yang menekankan pada ideologi ini tercermin misalnya pada upaya-upaya membendung radikalisme dengan melakukan penafsiran tandingan terhadap konsep-konsep kunci seperti *jihad* dan *darul kufir*. Cara pandang seperti ini cenderung mengesampingkan dinamika personal dan konteks sosial politik yang memungkinkan partisipasi dalam kelompok radikal. Dalam ilmu sosial dan politik perspektif ini mewakili paradigma esensial yang melihat aspek-aspek inheren dalam agama berupa doktrin-doktrin yang termuat dalam kitab suci sebagai sumber ideologi ekstrimisme dan kekerasan. Cara pandang seperti ini bisa menjadi dasar program kontra-radikalisme yang tidak efektif; misalnya dalam bentuk penyebaran tafsir alternatif terhadap doktrin-doktrin keagamaan yang dianggap kunci dalam radikalisme. Strategi demikian bisa tidak efektif karena beragamnya otoritas keagamaan. Kelompok radikal mempunyai tokoh agama sendiri yang dianggap lebih otoritatif dalam memberikan tafsir atas teks keagamaan.

ideologi sebenarnya tidak berperan pada tahap awal proses radikalisasi.<sup>5</sup> Tulisan ini juga memberi alternatif pemahaman terhadap kesimpulan yang menekankan pada kemiskinan sebagai akar radikalisasi.<sup>6</sup> Mendukung kesimpulan banyak penulis yang meragukan korelasi antara kemiskinan dan radikalisasi,<sup>7</sup> tulisan ini memberi perhatian terhadap perubahan sosial politik di Indonesia yang mendukung daya tarik dan mobilisasi gerakan radikal.

Tulisan ini akan diawali dengan diskusi tentang perubahan demografi dan lanskap sosial keagamaan yang terjadi Indonesia sejak terbukanya keran kebebasan politik tahun 1998. Pada bagian selanjutnya akan disajikan kerangka konseptual dalam memahami proses radikalisasi; ini menjadi pengantar bagi diskusi selanjutnya tentang situasi sosial yang memungkinkan transmisi pengaruh radikalisme. Tulisan ini akan ditutup dengan menunjukkan implikasi kebijakan dan aksi dalam mencegah radikalisasi di kalangan anak muda, terutama terutama dalam konteks pendidikan Islam.

## **Kaum Muda Di Tengah Perubahan Demografi dan Pergeseran Arena Kontestasi**

Di tengah tren *booming* kelas menengah yang semakin mewarnai kehidupan publik di Indonesia, ada perkembangan lain yang bisa jadi akan menentukan masa depan Indonesia, yakni pertumbuhan populasi anak muda dan pergeseran lanskap sosial keagamaan yang mengarah pada konservatisme.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menunjukkan terus bertambahnya populasi anak muda yang secara ekonomi dianggap sebagai bonus (keuntungan) demografi. Lebih dari separo (60 persen) populasi Indonesia masuk dalam kategori usia di bawah 40 tahun. 28.8 persen dari proporsi ini berusia 14

---

<sup>5</sup> Pandangan penulis ini sejalan dengan Clark McCauley dan Sophia Moskalenko, *Friction: How Radicalization Happens to Them and Us*, Oxford University Press, 2011, hlm. 206-214.

<sup>6</sup> Cara pandang strukturalis yang menekankan pada faktor kemiskinan ini tercermin misalnya dalam komentar Noor Huda Ismail, salah satu pengamat terorisme yang berpengaruh di Indonesia. Menanggapi penangkapan belasan anggota jaringan teroris di beberapa daerah di Indonesia pada bulan Mei 2013, Noor Huda Ismail menganggap program deradikalisasi tidak menyentuh segmen sosial yang rentan terhadap pengaruh ajaran teroris. Yang dimaksud kelompok rentan oleh Ismail adalah masyarakat miskin dan terpinggirkan (*poor and marginalized people*). Lihat komentar Ismail sebagaimana dikutip Oyo Saroso H.N., "Antiterror Measures Miss Mark," *Jakarta Post*, 11 Mei, 2013. Kesimpulan ini tidak didukung oleh fakta bahwa ada begitu banyak masyarakat miskin di Indonesia, tetapi hanya sedikit yang terpengaruh ideologi terorisme. Salah satu kajian yang menunjukkan korelasi negatif antara radikalisme dan kemiskinan adalah Jitka Maleckova, "Impoverished Terrorists: stereotype or Reality", dalam Tore Bjorgo (ed.), *Root causes of Terrorism: myths, Reality and ways Forward*, Routledge, 2006, hlm. 33-42.

<sup>7</sup> Jitka Maleckova, *ibid.*

tahun ke bawah dan sisanya (32.3 persen) berusia 15-39 tahun.<sup>8</sup> Jika mengikuti prediksi Bank Dunia bahwa angka kelahiran di Indonesia akan terus berada pada level 2.2 maka bisa diperkirakan jumlah populasi anak muda di Indonesia akan terus bertambah.<sup>9</sup>

Yang patut dicatat para anak muda yang menempati proporsi signifikan dalam peta demografi Indonesia ini sekarang sedang hidup dalam situasi sosial-keagamaan yang mengarah pada penguatan konservatisme dan identitas keagamaan. Konservatisme di sini dicitrakan dengan cara befikir yang menekankan supremasi agama sendiri dengan menganggap agama lain sebagai ancaman. Seringkali konservatisme demikian juga disertai dengan desakan yang makin kuat terhadap formalisasi nilai keagamaan dalam bentuk kontrol kehidupan publik oleh nilai agama sendiri tanpa mempedulikan nilai dan kepentingan agama lain.

Sebagai individu yang labil anak muda bisa dianggap segmen sosial yang rentan terhadap pengaruh gelombang konservatisme yang sedang berlangsung di sekitar mereka. Hal ini diindikasikan oleh temuan sejumlah lembaga survei yang menunjukkan kuatnya pengaruh konservatisme di kalangan anak muda. Pada tahun 2009, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) di Yogyakarta melakukan survei tingkat toleransi di kalangan siswa di 20 SMA di Yogyakarta. Hasilnya cukup mengejutkan. 69.9 persen anak dari siswa yang disurvei dinilai mempunyai tingkat toleransi yang rendah terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Kategori tingkat toleransi yang rendah ini diukur diantaranya oleh keengganan untuk berteman atau dipimpin oleh mereka yang berbeda keyakinan.<sup>10</sup> Riset yang terbatas dilakukan di Yogyakarta ini sejalan dengan survei di tempat lain yang dilakukan oleh lembaga yang berbeda. Sebuah survei dilakukan di Jakarta oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) terhadap sampel siswa di 100 SMA di Jakarta ini menemukan 48.5 persen responden mendukung bahkan bersedia turut serta dalam aksi kekerasan atau persekusi terhadap kelompok minoritas agama

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010- Penduduk menurut Umur Tunggal Daerah Perkotaan/Pedesaan dan Jenis Kelamin, <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Umur+Tunggal%2C+Daerah+Perkotaan%2FPerdesaan%2C+dan+Jenis+Kelamin&tid=262&search-wilayah=Indonesia&wid=0000000000&clang=id> [5 Oktober 2012].

<sup>9</sup> Sebagaimana dikutip Burhanuddin Muhtadi, "Demokrat Islamis: Proyek Islamisasi Kaum Muda," makalah diskusi di Komunitas Salihara, 2012, [http://kalam.salihara.org/media/documents/2012/02/16/d/i/diskusi-demokrat\\_islamis-burhanuddin.pdf](http://kalam.salihara.org/media/documents/2012/02/16/d/i/diskusi-demokrat_islamis-burhanuddin.pdf). [31 August, 2012]. Lihat juga World Bank (2012), "Fertility Rate, Total (birth for women)," <http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN>. [5 Oktober, 2012].

<sup>10</sup> Farid Wajidi, Salim, H. Kustini Sih, W., (2009), *Toleransi Siswa di DIY: Laporan Survei, LKIS-Hivos, Yogyakarta*. Lihat juga Farid Wajidi, "Kaum Muda dan Pluralisme," in *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, Centre for Religious and Cross-cultural Studies and Mizan, 2011.

lain.<sup>11</sup> Temuan LaKIP ini menuai kontroversi dan dianggap berlebihan oleh sebagian kalangan.<sup>12</sup>

Terlepas dari kritik yang muncul, hasil kedua survei di atas sejalan dengan sebagian dari penemuan survei yang dilakukan oleh Goethe Institute terhadap anak muda secara nasional. Survei lembaga penelitian asal Jerman ini menemukan 47.5 persen anak muda Muslim di Indonesia pertama-tama menekankan identitas mereka sebagai Muslim lebih utama daripada identitas kebangsaan. Survei yang sama juga menemukan dukungan yang tinggi terhadap penerapan hukum Islam secara literal seperti hukum potong tangan untuk pencuri dan pelarangan peredaran alkohol.<sup>13</sup> Pandangan keagamaan ‘konservatif’ yang mengarah pada intoleransi tentu tidak bisa dilarang dalam negara demokrasi; namun jika situasi ini terus berkembang dan tidak direspon dengan baik maka bisa menjadi bom waktu yang suatu saat bisa meledak apabila ada pemicu dan kesempatan. Seringkali kecenderungan konservatif ini mempunyai kesamaan cara pandang dan narasi dengan kelompok radikal. Tentu saja konservatisme dan intoleransi tidak semerta-merta tumbuh menjadi radikalisme, tetapi menguatnya karakter keagamaan demikian bisa menjadi lahan yang subur bagi mobilisasi radikalisme.

Sayangnya, perubahan lanskap sosial-keagamaan ini cenderung terkesampingkan oleh perhatian yang lebih besar terhadap dua bentuk lain politik Islam, yakni kegagalan partai politik Islam dan porak-prandanya jaringan organisasi teror. Kegagalan dua bentuk ekspresi politik Islam ini membuat sebagian kalangan percaya bahwa politik Islam tidak mempunyai peluang menjadi besar di Indonesia. Tetapi situasi sebaliknya bisa saja terjadi. Kekecewaan terhadap kegagalan politik Islam di politik tingkat tinggi dalam bentuk partai politik bisa memotivasi aktifis radikal mengalihkan fokus untuk memperkuat basis gerakan di level masyarakat. Hal ini didukung oleh konteks kebebasan politik di Indonesia saat ini. Gerakan di level masyarakat bisa lebih menjajikan daripada percaturan politik kepartaian yang terbukti rentan konflik atau perpecahan dan kompromistis. Apa yang terjadi saat ini bisa membalik sejarah ke belakang ketika tokoh politik Islam pada masa-masa awal kemerdekaan seperti Muhammad Natsir menerima saran Soekarno bahwa jika konstituen pendukung Syari’ah Islam di masyarakat Islam cukup kuat atau mencapai mayoritas maka tujuan menjadikan Indonesia negara Islam bisa terwujud melalui

<sup>11</sup> Tempo Interaktif (26 April, 2011), ‘Separo Pelajar Setuju Aksi Radikal Berlabel Agama,’ available at. <http://www.tempo.co/read/fokus/2011/04/26/1855/Separuh-Pelajar-Setuju-Aksi-Radikal-Berlabel-Agama> [31 Agustus, 2012].

<sup>12</sup> Detik (28 April, 2011), “Ramai-Ramai Menolak Tak Percayai Survei LaKIP,” <http://news.detik.com/read/2011/04/28/151617/1627803/159/ramai-ramai-tak-percayai-survei-lakip> [31 Agustus, 2012].

<sup>13</sup> Goethe Institute (2011), *Values, Dreams, Ideals: Muslim Youth in Southeast Asia- Surveys in Indonesia and Malaysia*, available at. [http://www.goethe.de/ins/id/prof/jugendstudie/jugendstudie\\_en.pdf](http://www.goethe.de/ins/id/prof/jugendstudie/jugendstudie_en.pdf). [31 Agustus, 2012].

demokrasi. Bagi kebanyakan ilmuwan politik, saran demikian bisa dianggap konyol karena demokrasi mempunyai karakter bawaan yang tidak memberi peluang bagi politik ekstrim. Tidak bisa dibayangkan aspirasi ekstrim dalam bentuk mendirikan negara Islam bisa terwujud dalam ranah demokrasi yang menuntut aktor politik bergerak ke tengah. Meski demikian, aktifis politik Islam bisa tidak percaya dengan teori politik seperti ini. Jika basis sosial politik Islam sudah sangat kuat, maka arus perubahan tidak bisa lagi dibendung, bahkan oleh mekanisme demokrasi.<sup>14</sup>

Dengan cara pandang seperti ini, anak muda adalah sasaran mobilisasi yang paling tepat karena mereka bisa menjadi tokoh politik di masa depan. Meski realitas *real politik* saat ini tidak berpihak pada politik Islam, namun perubahan orientasi keagamaan di kalangan anak muda saat ini yang cenderung reseptif (menerima) terhadap pengaruh intoleransi dan radikalisme maka bukan tidak mungkin mereka akan menjadi kekuatan sosial-politik yang signifikan di masa depan yang akan merubah wajah politik Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap aspirasi politik Islam yang bersifat radikal. Gerakan sosial ini sekarang menemukan ruangnya melalui kelompok-kelompok penekan non-partai (yang bergerak menggunakan isu-isu bersama seperti pemberantasan aliran sesat dan Kristenisasi) dan jejaring sosial yang mengkombinasikan ideologi keagamaan, hubungan pertemanan dan peluang ekonomis. Meski minoritas, kelompok-kelompok radikal ini menawarkan aktivisme yang memberi makna hidup bagi banyak anak muda yang mencari jati diri.

Radikalisasi di kalangan anak muda sebenarnya sudah lama terjadi sejak tahun 1980an, namun perhatian pengamat dan akademisi selama ini masih terfokus pada pergerakan di tingkat universitas melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Banyaknya anak muda yang terpengaruh ideologi radikal di usia remaja mengagetkan banyak pihak karena ternyata radikalisasi sudah terjadi lebih dini sejak usia sekolah menengah. Tahap lebih awal dari mata rantai radikalisasi relatif terabaikan.

## **Menakar Ulang Pemahaman tentang Radikalisasi**

Tidak ada definisi yang tunggal dan diterima semua kalangan terhadap istilah radikalisasi atau radikal. Istilah ini digunakan oleh banyak kalangan dengan muatan makna yang beragam. Istilah radikalisme seringkali digunakan secara bergantian dengan makna yang sama dengan beberapa istilah lain seperti intoleransi, militansi,

---

<sup>14</sup> Keyakinan demikian dipegang diantaranya oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Lihat Mohammad Iqbal Ahnaf, *From Revolution to 'Refolution'; A Study of Hizb al-Tahrir, Its Changes and Trajectories in the Democratic Context of Indonesia*, Disertasi tidak terbit, Victoria University of Wellington, 2011, hlm. 33-66.

ekstrimisme dan terorisme. Perdebatan seputar konsep radikalisisi dirangkum dengan sangat baik oleh Alex P. Schmid dalam tulisanya berjudul “Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review.” Bagi Schmid sendiri radikalisisi dipahami sebagai proses dimana:

“individu atau kelompok berubah kepada kecenderungan menentang dialog dan kompromi dengan pihak yang berbeda; mereka memilih jalan konfrontasi dan konflik. Pilihan ini disertai oleh dukungan terhadap (i) penggunaan tekanan dan strategi memaksa (*coersion*) dengan jalan kekerasan atau non-kekerasan, (ii) legitimasi atau dukungan terhadap berbagai bentuk kekerasan, selain terorisme, untuk mewujudkan tujuanya yang dianggap mulia, dan (iii) pada ujungnya bisa berlanjut ke level tertinggi dalam bentuk kekerasan ekstrim atau terorisme. Proses ini...biasanya diikuti oleh kecenderungan penguatan ideologi yang menjauh dari arus utama (*mainstream*) dan mengarah kepada titik ekstrim yang didasari oleh cara pandang dikotomis dan keyakinan bahwa kemapanan sistem yang ada tidak lagi bisa menjadi jalan bagi terjadinya perubahan yang diinginkan; karenanya kekerasan menjadi semakin ditolerir alternatif terhadap sistem yang ada” (Schmid, 2013: 18).<sup>15</sup>

Dengan bahasa lain, Demant, Sloodman, Buijs & Tillie menjelaskan radikalisisi sebagai proses penguatan “de-legitimasi” terhadap dua hal, yakni sistem dan lingkungan sosial. Radikalisisi individu atau kelompok ditandai oleh menurunnya keyakinan terhadap tatanan sosial-politik yang ada dan upaya menarik diri dari relasi sosial di luar kelompoknya sendiri. Karena tidak percaya dengan jalan perubahan melalui sistem dan tidak percaya dengan lingkungan sosial di sekitarnya, orang radikal cenderung mentolerir kekerasan sebagai alternatif jalan keluar.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Kutipan ini adalah terjemahan bebas dari definisi Schmid berikut: “[a]n individual or collective (group) process whereby, usually in a situation of political polarisation, normal practices of dialogue, compromise and tolerance between political actors and groups with diverging interests are abandoned by one or both sides in a conflict dyad in favour of a growing commitment to engage in confrontational tactics of conflict-waging. These can include either (i) the use of (non-violent) pressure and coercion, (ii) various forms of political violence other than terrorism or (iii) acts of violent extremism in the form of terrorism and war crimes. The process is, on the side of rebel factions, generally accompanied by an ideological socialization away from mainstream or status quo-oriented positions towards more radical or extremist positions involving a dichotomous world view and the acceptance of an alternative focal point of political mobilization outside the dominant political order as the existing system is no longer recognized as appropriate or legitimate.” Lihat oleh Alex P. Schmid dalam tulisanya berjudul “Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review,” International Centre for Counter-Terrorism, 2013, hlm. 18.

<sup>16</sup> Demant, F., Sloodman, M., Buijs, F., & Tillie, J.. Deradicalisation of right-wing radicals and Islamic radicals. In J. v. Donselaar & P. R. Rodrigues (Eds.), *Monitor racism & extremism : Achtste Rapportage*. Amsterdam: Anne Frank Stichting, 2008.

Bagaimana proses radikalisasi atau keterlibatan individu dalam kelompok radikal terjadi? Banyak yang berpendapat bahwa ideologi memegang peranan penting dalam proses radikalisasi. Ideologi- dalam pengertian doktrin tentang tujuan politik-keagamaan dan cara mewujudkan tujuan tersebut, yang menjanjikan tatatan sosial-politik yang lebih ideal dengan legitimasi keTuhanan- dianggap menjadi daya tarik utama yang memikat individu atau kelompok untuk bergabung. Berbeda dengan asumsi ini, penelitian beberapa ilmuwan terhadap profil anggota kelompok-kelompok radikal menunjukkan ideologi semata tidak cukup dalam mendorong radikalisasi. Lebih dari itu, pengaruh atau daya tarik ideologi biasanya tidak muncul pada tahap awal interaksi individu dengan kelompok radikal.<sup>17</sup> Internalisasi ideologi biasanya baru muncul belakangan ketika individu sudah masuk dalam kelompok radikal. Indoktrinasi ideologi biasanya lebih dibutuhkan sebagai alat justifikasi untuk melakukan kekerasan.

Ilmuwan gerakan sosial, Quintan Wictorowicz, pada tahun 2005 mengenalkan konsep *cognitive opening* sebagai proses awal radikalisasi. *Cognitive opening* adalah situasi ketika seseorang menemukan cara pandang yang memberi penjelasan terhadap situasi di sekitarnya yang dinilai tidak adil.<sup>18</sup> Karenanya mereka, khususnya anak muda, yang rentan terhadap pengaruh radikalisme biasanya bukanlah orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup dalam tentang agama, meski bukan berarti mereka tidak terdidik dalam pengertian tingkat pendidikan. Banyak, kalau bukan sebagian besar, dari mereka yang bergabung dalam kelompok radikal pernah memperoleh pendidikan di sekolah favorit dan level perguruan tinggi. Bergabungnya seseorang dalam kelompok radikal biasanya berlangsung secara bertahap. Pada tahap awal, sasaran rekrutmen oleh aktifis radikal adalah mempengaruhi individu untuk mau hadir dalam acara kegiatan yang bersifat terbuka seperti tabligh akbar, demonstrasi dan seminar atau yang lebih tertutup dalam bentuk tatap muka dengan anggota kelompok yang mempunyai kesamaan pengalaman atau identitas dengan individu yang menjadi target. Menurut Wictorowitz, isu utama yang biasanya menjadi tema pembicaraan pada tahap awal interaksi antara pelaku dan sasaran adalah viktimisasi umat Islam, seperti konflik Muslim-Kristen di Ambon, kekejaman tentara Amerika Serikat di Afghanistan, Iraq, penjajahan Israel di Palestina dan lain-lain.<sup>19</sup> Isu yang lebih menyetuh emosi Muslim secara umum ini digunakan karena dianggap lebih mudah menjangkit target secara luas. Diskusi ideologis pada tahap awal bisa menimbulkan polemik yang membatasi jangkauan pengaruh aktifis radikal.

---

<sup>17</sup> Lihat Clark McCauley dan Sophia Moskalenko, *ibid*.

<sup>18</sup> Quintan Wictorowicz, *Radical Islam Raising: Muslim Extremism In The West*, Rowman & Littlefield Publishers, 2005, hlm. 83-133.

<sup>19</sup> Quintan Wictorowicz, *ibid*.



Terget utama tahap *cognitive opening* ini adalah membangun relasi untuk membuka pintu bagi sasaran untuk bergabung lebih jauh dengan aktifitas kelompok radikal. Ketika sasaran sudah masuk dalam jaringan dan menunjukkan keinginan yang kuat untuk terlibat, barulah indoktrinasi ideologi dilakukan. Pada titik ketika sasaran sudah menerima ideologi maka bisa dikatakan ia telah bergabung dalam kelompok radikal.

Meski demikian, yang patut dicatat keterlibatan seseorang dalam kelompok radikal tidak selalu dimotivasi oleh pertimbangan rasional dalam pengertian kalkulasi bahwa aktivisme yang dijalankan kelompoknya secara strategis akan mampu mewujudkan tujuan mendirikan negara agama sebagaimana doktrin ideologi yang diterima. Penelitian Max Abrahms terhadap aktivisme kelompok radikal menunjukkan gerakan radikal dan terorisme tidak pernah berhasil menjadi alat penekan untuk mewujudkan cita-cita pendirian negara agama. Meski demikian, kegagalan tidak membuat aktivisme berhenti. Hal ini menurut Abrahms terjadi karena bagi mereka ikatan sosial yang terbentuk dalam kelompok radikal berperan penting dalam proses keterlibatan. Abrahms menyebut ikatan kelompok ini dengan konsep "*condition of communion*."<sup>20</sup> Solidaritas kelompok ini memberi nilai dan daya tarik yang kuat terutama bagi seseorang yang merasa terasing (alienasi) dan tercerabut dari akar identitas asalnya. Selain motivasi keagamaan (seperti mati syahid), solidaritas kelompok seperti inilah yang membuat anggota kelompok radikal bersedia untuk melakukan aktivisme yang beresiko tinggi (bahkan memisahkan mereka dari keluarga) dan melakukan kekerasan secara ekstrim.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa titik krusial dalam radikalisisasi adalah situasi yang memfasilitasi *cognitive opening* (baik secara fisik atau virtual) dan ruang atau komunitas yang bisa menangkap kegelisahan dan keterasingan sosial. Penting disebutkan lagi tema yang selalu muncul dalam tahap awal radikalisisasi adalah viktimisasi umat Islam.

## **Struktur Peluang Politik Radikalisisasi di Kalangan Anak Muda**

Analisa faktor radikalisisasi bisa dilakukan di tiga level, mikro, meso dan makro. Level *micro* menekankan pada latar belakang individual aktifis radikal yang terkait misalnya problem personal, keterasingan dan krisis identitas. Penelitian tentang radikalisme dan terorisme memberikan banyak perhatian pada level ini. Sementara dua level yang lebih luas, yakni lingkungan sosial (*meso*) dan struktural dalam bentuk peran pemerintah dan masyarakat dalam skala lebih luas (*macro*) kurang mendapat perhatian. Bagian ini mendiskusikan beberapa situasi di kedua

<sup>20</sup> Max Abrahms, "What Terrorists Really Want: Terrorist Motives and Counterterrorism Strategy," *International Security*, 32 (4) (Spring 2008): 78-105.

level tersebut yang bisa dinilai memberi struktur peluang politik bagi radikalisasi, termasuk kedua faktor yang dibahas di bagian sebelumnya, “*cognitive opening*” dan “*condition of communion*.”

### 1. Kontrol Ruang Publik dan Radikalisasi di Sekolah

Temuan survei LaKIP yang menunjukkan menguatnya intoleransi dan radikalisme di sekolah menimbulkan dugaan atau tuduhan dari sebagian kalangan bahwa lembaga kegiatan ekstra-kurikuler keagamaan di sekolah seperti organisasi Kerohanian Islam (Rohis) berperan menjadi medan penyebaran pengaruh radikalisme. Dugaan ini diperkuat oleh kasus penangkapan tujuh anak muda anggota jaringan teroris di Klaten pada tahun 2011. Lima dari ketujuh orang yang ditangkap tersebut diketahui pernah aktif di organisasi Rohis di SMK tersebut. Hal ini memberi kesan seakan Rohis berperan menjadi basis radikalisasi anak muda. Tuduhan ini segera dibantah asosiasi pengurus Rohis. LaKIP sendiri meski hasil penelitiannya menunjukkan menguatnya radikalisasi membantah dugaan Rohis menjadi basis radikalisasi. Transmisi radikalisasi, menurut LaKIP lebih banyak terjadi melalui media-media radikal di internet yang diakses siswa.<sup>21</sup>

Tentu berlebihan membuat kesimpulan yang memukul rata bahwa Rohis berperan dalam radikalisasi. Pada tahun 2010 Salim, Kailani dan Azekiyah melakukan penelitian etnografis di tiga SMUN favorit di Yogyakarta. Penelitian yang diterbitkan Centre for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada berjudul “Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta” ini menunjukkan variasi dari orientasi gerakan dan tingkat pengaruh Rohis di tiga SMUN yang diteliti.<sup>22</sup> Salah satu dari ketiga sekolah ini menunjukkan peran Rohis yang sangat kuat dalam mengontrol kehidupan publik siswa di sekolah berdasarkan nilai-nilai keIslaman yang mereka pahami. Meski berstatus sekolah umum negeri, Rohis di sekolah ini membangun citra keIslaman yang sangat kuat sehingga mengidentifikasi diri dengan sebutan sekolah *Darussalam* (rumah perdamaian/Islam).

Di sekolah ini Rohis tidak hanya berhasil mengajarkan nilai-nilai keIslaman pada level individu siswa, tetapi juga menentukan norma atau standar pergaulan dan aktifitas siswa di sekolah seperti segregasi siswa laki-laki dan

<sup>21</sup> Tempo, “Survei: Rohis di Sekolah Tak Picu Radikalisme,” [29 April, 2011], <http://www.tempo.co/read/news/2011/04/29/173330920/Survei-Rohis-di-Sekolah-Tak-Picu-Radikalisme>.

<sup>22</sup> Hairus Salim, Najib Kailani dan Nikmal Azekiyah, *Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta*, CRCS, 2011.

perempuan dalam kegiatan sekolah, larangan sisiwi ikut kontes bernyanyi, tekanan terhadap siswa yang pacaran, dan larangan berjabat tangan antara siswa putra dan putri. Selain itu Rohis juga memenuhi ruang-ruang publik di sekolah dengan simbol, berita, esai dan informasi keIslaman. Alhasil, meski berstatus sekolah umum negeri yang mestinya terbuka terhadap siswa dari baragama latar belakang keagamaan, kehidupan sehari-hari sekolah ini layaknya sebuah pesantren.

Citra sekolah yang begitu kuat dalam menegakkan norma-norma keIslaman tentu saja membatasi minat keluarga dari agama non-Islam atau keluarga Muslim yang tidak setuju dengan pengaturan secara ketat pergaulan sehari-hari siswa yang pada tingkat tertentu dianggap membatasi kreatifitas siswa. Akibatnya terjadi homogenisasi demografi siswa serta cara pandang sosial keagamaan dan praktek pergaulan di sekolah. Situasi ini memungkinkan penguatan pengaruh dan kontrol Rohis terhadap pergaulan dan kehidupan publik siswa di sekolah. Keseragaman ini membatasi interaksi atau pengalaman siswa dengan keragaman yang mendukung proses pembentukan karakter eksklusif.

Dalam situasi seperti ini, dan dengan dukungan otoritas sekolah, Rohis di SMUN ini berhasil membangun rekayasa sosial yang mengarahkan siswa untuk menerima pengaruh ideologi mereka. Kegiatan-kegiatan keagamaan Rohis yang pada dasarnya adalah kegiatan ekstra-kurikuler seperti kajian agama, sholat berjamaah, mentoring, *Mabit* (malam bina iman dan takwa) menjadi kegaitan utama di sekolah. Melalui kegiatan-kegiatan ini Rohis tidak hanya menanamkan nilai-nilai spritirualitas dan ketaatan agama, tetapi juga doktrin-doktrin politik Islam yang diambil dari tokoh-tokoh gerakan Ikhwanul Muslimini seperti Sayid Qutb dan Hassan Al-Banna. Kegiatan-kegiatan Rohis menjadi begitu penting di sekolah sampai muncul kebijakan sekolah yang mamsukkan keterlibatan siswa dalam aktifitas Rohis dalam sistem penilaian raport siswa.

Selain kebijakan-kebijakan yang dibuat eksplisit seperti segregasi siswa berdasarkan jenis kelamin, Rohis juga membangun sistem kontrol sosial melalui lembaga penegakan moral yang secara internal disebut Pansus (Panitia Khusus) atau juga disebut *Khadamul Ummah Yaumiyah*. Unit di bawah Rohis ini bertugas menjadi semacam satuan penegakan moral untuk memastikan kehidupan sehari-hari siswa sesuai dengan stardard Islam yang mereka pahami. Seorang siswa yang diwawancarai dalam penelitian ini mengaku bahwa Rohis mempunyai unit bawah tanah (merujuk pada Pansus) yang bertugas mengidentifikasi siswa-siswa yang berpacaran. Mereka akan

mendekati siswa yang berpacara secara terus menerus agar menghentikan praktek yang dianggap bertentangan dengan Islam.

Bagaimana aktifis-aktifis muda di level SMU bisa melakukan kontrol sosial sedemikian rupa? Aktivisme Rohis di sekolah ini, dan di banyak sekolah lain, tidak lepas dari hubungan Rohis dengan gerakan Islam di level universitas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Kegiatan Rohis didukung oleh senior-senior mereka dari almuni sekolah yang aktif di gerakan Islam di universtas. Aktifis mahasiswa dihadirkan sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan diskusi dan pembinaan agama di yang diselenggarakan Rohis di sekolah.

Apa yang terjadi di “SMUN Darussalam” ini bisa jadi juga terjadi di banyak sekolah lain, tetapi ini tidak menggambarkan karakter Rohis secara keseluruhan. Peran Rohis di sekolah tidak selalu signifikan. Di banyak sekolah kegiatan Rohis tidak terlalu diminati sekolah dan kalah pamor dengan organisasi ekstra-kurikuler lain seperti olah raga, belas diri, pecinta alam, theatre, band dan klub sains.

Berbeda dengan Rohis di “SMUN Darussalam,” Rohis di dua dari tiga SMUN yang diteliti Salim, Kailani dan Azekiyah nampak tidak sangat berpengaruh dan relatif lebih terbuka. Rohis di kedua sekolah ini sebenarnya juga mempunyai kegiatan yang serupa dengan Rohis “SMUN Darussalam” seperti mentoring dan *mabit*; tetapi mereka harus berkompetisi dalam rekrutemen anggota dengan organisasi-organisasi ekstrakurikuler lain. Ruang kompetisi yang terbuka mendorong Rohis untuk bersikap lebih terbuka dan moderat. Ruang publik yang terbuka memungkinkan diskusi dan kritik sehingga peran Rohis dalam menegkampanyekan nilai-nilai keIslaman hanya bisa dilakukan dengan cara persuasi. Tidak ada tekanan sosial untuk memakai jilbab dan memisahkan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan siswa. Tuntutan untuk lebih terbuka ini berdampak pada karakter sosial-keagamaan Rohis di kedua sekolah ini sehingga menjadi lebih terbuka dan menghargai keragaman. Di salah satu sekolah, sikap moderat Rohis bahkan terwujud dalam bentuk kegiatan outbond rutin yang melibatkan siswa dari agama yang berbeda. Siswa non-Muslim diberi hak untuk mendapatkan layanan atau mempraktekkan nilai keagamaan mereka berdampingan dengan aktifitas keIslaman yang dijalankan Rohis.

Gambaran situasi di ketiga sekolah ini menunjukkan pentingnya ruang publik di sekolah yang memungkinkan interaksi atau pengalaman siswa terhadap keragaman. Keberhasilan Rohis di “SMUN Darussalam” tidak lepas dari

peran otoritas sekolah yang mengizinkan kontrol sosial dan homogenisasi sosial oleh Rohis. Tentu kontrol sosial demikian tidak selalu berpihak kepada kelompok Islam keagamaan yang bersifat eksklusif dan intoleran. Di tempat lain, bisa jadi kelompok non-agama berperan dominan. Karena itu otoritas sekolah mempunyai peran penting dalam menjaga ruang publik yang memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih jenis kreatifitas dan gaya hidup berdasarkan keyakinan mereka.

Radikalisasi biasanya terjadi dalam situasi homogenisasi sumber pengetahuan dan informasi sehingga membatasi daya kritis individual. Ketika ruang sosial didominasi oleh kelompok agama yang secara terus menerus menghadirkan narasi radikal, maka ini bisa menjadi struktur peluang politik bagi terjadinya proses radikalisasi. Sebagaimana ditunjukkan Salim, Kailani dan Azekiyah, kontestasi pemikiran, gaya hidup dan pengaruh politik sebenarnya juga terjadi di “SMUN Darussalam.” Beberapa organisasi ekstra-kurikuler seperti pecinta alam dan theater dikuasai oleh siswa-siswa yang menentang dominasi Rohis. Mereka dicitrakan sebagai “bad boys.” Sebagian siswi melakukan resistensi terhadap tuntutan mengenakan jilbab dengan memakai jilbab secara minimal. Namun demikian kuatnya pengaruh Rohis meminggirkan suara berbeda ini. Sehingga ruang sosial menjadi lahan yang subur bagi penyebaran narasi-narasi yang bersifat intoleran. Merujuk pada teori radikalisasi dalam bagian sebelumnya, penting sekali diperhatikan ruang-ruang sosial, terutama ketika kultur diskusi dan kritik tidak berjalan, yang bisa memfasilitasi *cognitive opening* yang mengarah kepada radikalisasi.

## 2. Kepanikan Moral dan Pencarian Keagamaan

Sekolah dengan citra keagamaan yang kuat, ditambah reputasi sebagai sekolah favorit, bisa dipastikan menjadi dambaan kebanyakan orang tua. Banyaknya kasus demoralisasi di kalangan anak muda yang secara kuat diilustrasikan oleh banyaknya kasus keterliban siswa sekolah dalam aksi tawuran, konsumsi narkoba dan bahkan pembuatan video porno turut menciptakan situasi kepanikan moral (*moral panic*)<sup>23</sup> di kalangan orang tua. Perubahan sosial di sebagian besar begara-negara di dunia, termasuk

<sup>23</sup> Istilah “*moral panic*” pertama kali dikenalkan oleh psikolog sosial, Stanley Cohen untuk menggambarkan reaksi publik terhadap ketakutan yang termanifestasi dalam perilaku menyimpang atau tidak biasa kelompok-kelompok dalam masyarakat. Istilah ini kemudian digunakan secara lebih luas untuk merujuk pada kelompok masyarakat yang merasa terancam oleh perubahan sosial, terutama di kalangan generasi muda yang dianggap menyimpang dari nilai atau keyakinan yang ada. Bagi Cohen kepanikan moral terjadi ketika individu atau kelompok berhadapan dengan situasi yang dianggap mengancam kepentingan dan nilai yang mereka pegang. Lihat Stanley Cohen, *Folk Devils and Moral Panics*. St Albans: Paladin, 1972.

Indonesia yang menunjukkan menguatnya peran agama dalam kehidupan sosial dan publik turut menempatkan pendidikan agama sebagai kebutuhan utama. Bagi banyak kalangan kepanikan moral tidak hanya bersumber dari demoralisasi tetapi juga kontestasi berbasis identitas keagamaan. Wacana yang berkembang melalui media-media Islam yang menyebarkan pengetahuan dan informasi tentang apa yang digambarkan sebagai Kristenisasi, liberalisasi pemikiran keagamaan dan aliran sesat turut mendorong banyak keluarga untuk mengirim anak-anak mereka ke 'lembaga pendidikan plus,' yakni lembaga pendidikan yang tidak hanya menjanjikan prestasi intelektual tetapi juga kesalehan atau penguatan identitas keagamaan.

Tuntutan ini mengakibatkan menjamurnya sekolah-sekolah berbasis agama yang moderen dan menyajikan standard pendidikan yang berkualitas, sebagian menggunakan label internasional. Meskipun sekolah-sekolah seperti ini umumnya mahal tetapi mereka menemukan pasar yang besar di kalangan kelas menengah di Indonesia yang sedang tumbuh pesat. Para orang tua yang semakin agamis dan mengalami kepanikan moral tidak mau melepaskan anaknya dalam lingkungan pendidikan yang tidak memperhatikan ancaman demoralisasi. Kaum kelas menengah yang kaya dan sibuk pada umumnya kurang mempunyai basis pendidikan agama yang kuat dan karena itu merasa tidak mampu memberikan pendidikan agama di rumah, lalu, memilih untuk mengirimkan anak-anak ke sekolah plus meskipun mahal.

Pertanyaanya siapa yang menyediakan jenis pendidikan seperti ini? Pada masa lalu organisasi-organisasi keagamaan arus utama seperti NU dan Muhammadiyah menjadi tujuan utama pilihan sekolah orang tua yang menginginkan agar anaknya terdidik secara agama. Sayangnya lembaga-lembaga pendidikan di bawah kedua organisasi ini, terutama yang di bawah NU, pada umumnya relatif terbelakang dari segi kualitas pendidikan. Meski lebih berpengalaman, mereka seringkali kalah bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam baru yang yang dikelola secara lebih modern dan didukung oleh jejaring kelas menengah yang kuat. Kualitas menejerial dan pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah pada umumnya lebih baik daripada yang dibawah NU, tetapi belakangan muncul kekhawatiran di sebagian kalangan termasuk tokoh Muhammadiyah terhadap menguatnya pengaruh "kelompok luar" dalam institusi pendidikan Muhammadiyah.

Yang dimaksud dengan “kelompok luar” diantaranya adalah Hizbut Tahrir Indonesia dan aktifis Ikhwanul Muslimin atau Tarbiyah.<sup>24</sup>

Menguatnya posisi lembaga-lembaga pendidikan baru yang berbasis agama ini sebenarnya merefleksikan situasi perubahan lanskap keagamaan di Indonesia secara lebih luas. Kegagalan elit dan institusi organisasi keislaman arus utama dalam beradaptasi dengan perubahan sosial mendorong proses pencairan ikatan sosial atau ideologis terhadap organisasi-organisasi arus utama yang selama ini dianggap sudah mengakar kuat pengaruhnya terhadap mayoritas Muslim di Indonesia. Munculnya otoritas-otoritas keagamaan baru nampak menjadi tantangan yang semakin kuat terhadap organisasi keagamaan arus utama dalam mempertahankan basis pertahanan terhadap karakter Islam di Indonesia yang moderat.

Tentu saja tidak semua kekuatan-kekuatan keagamaan baru ini mempunyai orientasi ideologi yang radikal atau ekstrim. Tetapi tidak dapat dipungkiri banyak dari mereka yang menekankan pada citra keagamaan dalam konteks persaingan dengan agama lain, melihat agama lain sebagai ancaman (demonisasi). Hadirnya cara pandang seperti inilah, bukan pendidikan yang menekankan pada kesalehan (*piety*) per se, yang patut dilihat sebagai struktur peluang politik bagi transmisi pengaruh radikalisme.

### 3. Kelemahan Alternatif Moderat

Menguatnya gairah keagamaan di masyarakat termasuk anak muda yang disertai dengan kepanikan moral menuntut layanan-layanan keagamaan yang bisa memenuhi kebutuhan spiritualitas masyarakat. Kelompok-kelompok kajian keagamaan yang tidak hanya menjejali audiens dengan pengetahuan keagamaan tetapi juga ruang pertemanan atau sosialisasi menjadi semakin dibutuhkan. Kelompok keagamaan seperti ini berperan menyediakan ruang bersama yang dalam ilmu sosial disebut *condition of communion*, yakni perasaan solidaritas yang menjadi dasar bagi perilaku kolektif. Nilai kelompok seperti inilah yang memungkinkan seseorang berkorban dan mengambil tindakan beresiko demi membela nilai kolektif kelompok, termasuk partisipasi dalam aktivisme radikal.

Tutupan layanan sosial keagamaan seperti ini tidak jarang disediakan oleh

---

<sup>24</sup> Contoh sikap Muhammadiyah yang merasa terusik oleh penetrasi “kelompok luar” tercermin dalam sebuah surat keputusan dari pengurus pusat Muhammadiyah yang disebarakan ke anggota Muhammadiyah. Lihat Muhammadiyah, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 149/Kep/I.0/B/2006 Tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Konsolidasi Organisasi Dan Amal Usaha Muhammadiyah, bisa diakses di <http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-aturan-organisasi.html>

kelompok-kelompok baru yang memberikan ruang bagi transmisi intoleransi dan ideologi radikal. Kelompok-kelompok baru seperti ini tidak selalu berorientasi radikal pada dirinya sendiri tetapi untuk kepentingan dakwah bersifat terbuka terhadap beragam pandangan keagamaan termasuk yang tokoh-tokoh yang membawa nilai intoleran.

Berbeda dengan karakter ini, advokasi pluralisme lebih banyak memberi penekanan kepada intelektualisme dan perjuangan hukum dalam bentuk diskusi, seminar dan penerbitan. Produksi pengetahuan seperti ini tentu berperan penting sebagai wacana tandingan, tetapi penekanan kepada intelektualisme seperti ini cenderung mengesampingkan menguatnya kebutuhan masyarakat akan komunitas yang bisa memenuhi kebutuhan akan spiritualisme dan solidaritas sosial. Karena itu muncul sindiran terhadap aktifis pluralisme yang menyatakan ‘kaum pluralis berbicara di seminar, kaum radikal berdakwah di masjid.’”

Kebutuhan lain di luar intelektualisme yang dibutuhkan anak muda saat ini adalah di sektor keahlian seperti menulis, jurnalisme dan kewirausahaan. Alternatif moderat terhadap kebutuhan saat ini sangat dibutuhkan untuk mengimbangi kemajuan gerakan radikal di bidang ini. Advokasi yang terlalu eksplisit bertujuan untuk menandingi radikalisme terkadang justru menimbulkan resistensi. Intervensi dalam bentuk promosi nilai-nilai keragaman melalui pelatihan dan pendampingan di bidang keahlian sangat dibutuhkan.

Sebagai ilustrasi, kegiatan pelatihan menulis yang di lakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) di Yogyakarta patut menjadi contoh. LKiS mempromosikan nilai penghargaan terhadap keragaman melalui program menulis kreatif. Program ini melatih siswa di berbagai sekolah dan mendampingi mereka untuk membangun komunitas menulis di sekolah masing-masing. Program ini mendorong siswa untuk mengalami keragaman melalui prakek penelitian dan menulis yang membawa mereka bertemu dengan realitas-realitas baru yang berbeda dari yang ditemui sebelumnya. Program semacam ini bisa berperan efektif dalam membentuk sensitifitas anak muda terhadap keragaman, dan karena itu membuat mereka lebih resisten terhadap pengaruh narasi dan ideologi radikal yang bersifat totalitarian atau dikotomis.

Selain keahlian menulis, tentu masih banyak bidang-bidang keahlian lain yang perlu menjadi perhatian. Jika alternatif-alternatif moderat yang bisa memenuhi kebutuhan anak muda di bidang spiritualitas, solidaritas sosial dan



pembekalan keahlian semakin banyak, maka kelompok-kelompok radikal yang memberikan layanan yang sama akan semakin sulit mendapatkan audiens. Secara tidak langsung hal ini bisa memperkecil struktur peluang politik bagi radikalisasi.

## **Simpulan**

Hingga saat ini pendidikan Islam masih menjadi sasaran kritik terkait munculnya gejala radikalisasi di kalangan anak muda. Tulisan ini menunjukkan bahwa agenda terpenting pendidikan Islam untuk menanamkan nilai toleransi bukanlah terletak pada reformasi kurikulum agar lebih banyak memuat pesan-pesan toleransi. Kurikulum di sebagian besar lembaga pendidikan Islam, termasuk mata pelajaran agama di sekolah umum, sebenarnya tidak lebih bermasalah daripada kegiatan ekstra-kurikuler dan lingkungan anak muda baik di sekolah dan luar sekolah yang memberi ruang bagi penyebaran pengaruh radikalisme.

Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Salim, Kailani dan Azekiyah, lingkungan sekolah yang memungkinkan penetrasi dan bahkan kontrol ruang publik oleh kelompok-kelompok yang mengenalkan ideologi radikal kepada siswa jauh lebih berpengaruh daripada kurikulum pendidikan agama yang ada. Karena itu bisa disimpulkan bahwa tantangan lembaga pendidikan Islam dalam mempromosikan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keragaman agama terletak pada kemampuan otoritas sekolah dalam mengelola lingkungan dan ruang publik sekolah yang mendorong kebebasan dan tradisi berfikir secara kritis. Otoritas sekolah perlu memahami materi dan pola-pola penyebaran paham radikal di kalangan anak muda, terutama di lingkungan sekolah, sehingga potensi pengaruh paham radikal bisa diantisipasi secara efektif.

Terahir, lembaga pendidikan Islam juga dituntut untuk mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama secara lebih kontekstual, menyediakan kelompok kajian dan kegiatan keagamaan yang mendorong interaksi siswa dengan keragaman. Secara tidak langsung hal ini diharapkan bisa membangun sikap toleransi dan kritisisme terhadap paham keagamaan yang dikotomis, absolutis dan penuh kebencian terhadap yang berbeda keyakinan.

## Rujukan

- Ahnaf, Mohammad Iqbal, *Contesting Morality: Youth Piety and Pluralism in Indonesia*, Pluralism Working Paper, No. 10, 2012.
- Ahnaf, Mohammad Iqbal, *From Revolution to 'Reolution'; A Study of Hizb al-Tahrir, Its Changes and Trajectories in the Democratic Context of Indonesia*, Disertasi tidak terbit, Victoria University of Wellington, 2011.
- Abrahms Max, "What Terrorists Really Want: Terrorist Motives and Counterterrorism Strategy," *International Security*, 32 (4) (Spring 2008).
- Badan Pusat Statistik, *Sensus Penduduk 2010- Penduduk menurut Umur Tunggal Daerah Perkotaan/Pedesaan dan Jenis Kelamin*, ><http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Umur+Tunggal%2C+Daerah+Perkotaan%2FPerdesaan%2C+dan+Jenis+Kelamin&tid=262&search-wilayah=Indonesia&wid=0000000000&lang=id>. [5 Oktober 2012].
- Cohen, Stanley, *Folk Devils and Moral Panics*. St Albans: Paladin, 1972.
- Demant, F., Slootman, M., Buijs, F., & Tillie, J.. *Deradicalisation of right-wing radicals and Islamic radicals*. In J. v. Donselaar & P. R. Rodrigues (Eds.), *Monitor racism & extremism : Achtste Rapportage*. Amsterdam: Anne Frank Stichting, 2008.
- Detik (28 April, 2011), "Ramai-Ramai Menolak Tak Percayai Survei LaKiP;" > <http://news.detik.com/read/2011/04/28/151617/1627803/159/ramai-ramai-tak-percayai-survei-lakip>. [31 Agustus, 2012].
- Goethe Institute (2011), *Values, Dreams, Ideals: Muslim Youth in Southeast Asia- Surveys in Indonesia and Malaysia*,. [http://www.goethe.de/ins/id/pro/jugendstudie/jugendstudie\\_en.pdf](http://www.goethe.de/ins/id/pro/jugendstudie/jugendstudie_en.pdf). [31Agustus 2012]. Muhammadiyah (2006), Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 149/Kep/I.O/B/2006 Tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Konsolidasi Organisasi Dan Amal Usaha Muhammadiyah, <http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-aturan-organisasi.html>. [20 Mei, 2013].
- Maleckova, Jitka, "Impoversihed Terrorists: stereotype or Reality", dalam Tore Bjorgo (ed.), *Root causes of Terrorism: myths, Reality and ways Forward*, Routledge, 2006.

- McCauley, Clark dan Moskalkenko, Sophia, *Friction: How Radicalization Happens to Them and Us*, Oxford University Press, 2011.
- Muhtadi, Burhanuddin (2012), “*Demokrat Islamis: Proyek Islamisasi Kaum Muda*,” makalah diskusi di Komunitas Salihara. [31 Agustus, 2012].
- Salim, H., Kailani, N. and Azekiyah, N., *Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta*, Centre for Religious and Cross-cultural Studies, Yogyakarta.
- Saroso H.N., Oyos, “Antiterror Measures Miss Mark,” Jakarta Post, 11 Mei, 2013.
- Schmid, Alex P. “Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review,” International Centre for Counter-Terrorism, 2013.
- Tempo Interaktif (26 April, 2011), ‘Separo Pelajar Setuju Aksi Radikal Berlabel Agama,’ available at. <http://www.tempo.co/read/fokus/2011/04/26/1855/Separuh-Pelajar-Setuju-Aksi-Radikal-Berlabel-Agama>. [31 Agustus, 2012].
- Tempo, “Survei: Rohis di Sekolah Tak Picu Radikalisme,” (29 April, 2011), <http://www.tempo.co/read/news/2011/04/29/173330920/Survei-Rohis-di-Sekolah-Tak-Picu-Radikalisme>. [1 Mei, 2013].
- Wajidi, Farid (2011), “Kaum Muda dan Pluralisme,” in *Pluralisme Kewargaan: Arah baur Politik Keragaman di Indonesia*, Centre for Religious and Cross-cultural Studies and Mizan.
- Wajidi, F., Salim, H. Kustiningsih, W., (2009), *Toleransi Siswa di DIY: Laporan Survei*, LKiS-Hivos, Yogyakarta.
- Wictorowicz, Quintan, *Radical Islam Raising: Muslim Extremism In The West*, Rowman & Littlefield Publishers, 2005.
- World Bank (2012), “Fertility Rate, Total (birth for women),” <http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN>. [31 Agustus, 2012].

